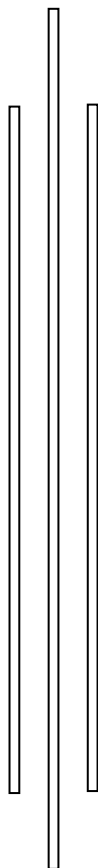




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR



LAPORAN KEUANGAN

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LAPORAN KEUANGAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ...	v
NERACA.....	vi
LAPORAN OPERASIONAL	vii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	viii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.	1
2.	2
3.	6
BAB II	7
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
1.	7
2.	11
BAB III	9
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	9
1.	12
a.	12
b.	23
2.	34
a.	34
b.	56

c.	57
3.	57
4.	71
BAB IV	62
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	62
1.	73
2.	74
BAB V	66
PENUTUP	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, 31 Desember 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

HERMAN WIDODO, SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 1991 2 001

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

(diganti Print out Simda)

Terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
Laporan -SKPD-Pembukuan Akrual-LRA
- 2) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
Laporan -SKPD-Pembukuan-LRA
- 3) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan dengan pilihan program dan kegiatan dikosongkan (untuk laporan belanja langsung dan tidak langsung) per 31 Desember 2024; *Laporan- SKPD-Pembukuan-LRA per Periode* (program kegiatan kosong)
- 4) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan (per 31 Desember 2024).
Laporan- SKPD-Pembukuan-LRA per Periode (program kegiatan diisi)

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(diganti Print out Simda)

***LAPORAN-SKPD-PEMBUKUAN AKRUAL-NERACA-NERACA SETELAH
PENGGABUNGAN (SAP)***

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

LAPORAN OPERASIONAL

PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2024

(diganti Print out Simda)

LAPORAN-SKPD-PEMBUKUAN AKRUAL-LAPORAN OPERASIONAL-FORMAT 1

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(diganti Print out Simda)

LAPORAN-SKPD-PEMBUKUAN AKRUAL-LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan tahun 2024 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2024 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 0 mencapai 0% dari anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 0 atau mencapai 0% dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2024 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.3.266.136.905,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 126.290.544,- investasi jangka panjang sebesar Rp. 0,- aset tetap sebesar Rp. 2.495.309.498,- dana cadangan Rp. 0,- dan aset lainnya sebesar Rp. 644.536.863,-

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 90.343.100,- yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 90.343.100,- dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,-

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 3.175.793.805,-

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus/defisit.

Pendapatan LO dari kegiatan Operasional Rp. 0,- Beban dari kegiatan Operasional Rp. 13.293.394.176,11 dan surplus/defisit sebesar Rp. 13.293.394.176,11

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

Ekuitas awal sebesar Rp. 3.175.793.805,- Surplus/Defisit Rp. 13.293.394.176,11 dan Ekuitas akhir sebesar Rp. 3.175.793.805,-

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam Penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- t. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 450);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A);
- dd. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015 Nomor 1/C);
- ee. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 6/B);
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 7/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 1/C);
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 9/A);
- ii. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 2/B);
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 5/E);

- kk. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/A) ;
- ll. Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 7/E);
- mm. Peraturan Bupati Blitar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 34/E);
- nn. Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 61/A);

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- c. Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya,;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 secara keseluruhan sebesar Rp. 16.558.599.628,- yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan (sesuai di Laporan Simda)	0,00
2.	Belanja Operasi (sesuai di Laporan Simda)	0,00
3.	Belanja Modal (sesuai di Laporan Simda)	0,00
	Surplus/(Defisit)	(0,00)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 Nomor DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2024 tanggal 20 September 2024 sebesar Rp. 16.558.598.628,- terdiri dari Anggaran Belanja Oprasi sebesar Rp. 15.574.191.769,- dan Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 984.407.859,- Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar selama tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

N o	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1.	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
	- <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA</i>	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja	0,00	0,00	0,00
	- <i>Belanja Operasi</i>	15.574.191.769,-	15.046.691.232,-	0,00
	- <i>Belanja Modal</i>	984.407.859,-	921.700.120,-	0,00
	Total Belanja	16.558.599.628,-	15.968.391.352,-	0,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Anggaran 1 Tahun	Realisasi	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp23,268,126	Rp23,170,900	99,58
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp79,033,099	Rp79,032,800	100
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3,287,045,518	Rp3,173,907,355	96,56
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp29,500,000	Rp29,490,000	99,97
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp5,930,125	Rp5,633,900	95,00
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp15,000,000	Rp13,085,000	87,23
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp2,776,660	Rp2,691,000	96,91
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp20,451,328	Rp19,470,300	95,20
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp134,821,000	Rp134,041,000	99,42
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp36,477,895	Rp35,562,500	97,49
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp1,750,000	Rp1,562,000	89,26
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp202,054,592	Rp201,930,203	99,94

13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp146,079,774	Rp133,752,000	91,56
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp4,162,500	Rp4,160,000	99,94
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp1,310,000	Rp309,392	23,62
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp858,262,958	Rp737,828,748	85,97
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp147,365,500	Rp133,124,190	90,34
18	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp64,028,501	Rp62,611,703	97,79
19	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp738,723,449	Rp658,740,784	89,17
20	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp3,302,380,443	Rp3,214,627,794	97,34
21	Pelayanan Informasi Publik	Rp921,392,080	Rp904,616,921	98,18
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp561,029,012	Rp555,583,074	99,03
23	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp184,725,820	Rp183,260,030	99,21

24	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan non Elektronik	Rp271,686,589	Rp260,907,228	96,03
25	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp4,366,619,406	Rp4,357,987,000	99,80
26	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp195,888,361	Rp162,105,640	82,75
27	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp364,190,800	Rp313,634,410	86,12
28	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp381,051,099	Rp372,894,872	97,86
29	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp95,351,902	Rp80,719,000	84,65
30	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp116,242,091	Rp111,951,608	96,31
	TOTAL	Rp16,558,598,628	Rp15,968,391,352	96,44

(diis

i sesuai dengan kegiatan yang ada dimasing-masing SKPD)

2. Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- a. Secara umum tidak terdapat kendala yang sangat berarti dari segi pelaksanaan karena rata-rata serapan sudah cukup tinggi;
- b. Dari segi perencanaan penganggaran masih terdapat beberapa poin yang sebenarnya bisa diefisiensi;
- c. Jangka waktu perencanaan penganggaran yang cukup singkat menyebabkan kurang tepatnya dalam pelaksanaan
- d. Dalam desk penyusunan RKA seharusnya diberikan waktu yang cukup sehingga mampu meneliti hingga ke ASB dan standart yang berlaku lainnya
- e. Terdapat standart harga yang belum mampu mengakomodir kebutuhan.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a. Pendapatan	0,00	0,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Anggaran dan Realisasi dalam Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023, adalah *nihil*.

No .	Pendapatan Daerah		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2024	2023
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	0,00	0,00
	(a)	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
	1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00	0,00
		- PKB-Mobil Penumpang-Sedan	0,00	0,00	0,00
		- PKB-Mobil Penumpang-Jeep	0,00	0,00	0,00
		- PKB-Mobil Penumpang-Minibus	0,00	0,00	0,00
		- PKB-Mobil Bus-Microbus	0,00	0,00	0,00
		- PKB-Mobil Bus-Bus	0,00	0,00	0,00
		- PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	0,00	0,00	0,00
		- PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	0,00	0,00	0,00
		- PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	0,00	0,00	0,00
		- PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	0,00	0,00
		- PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	0,00	0,00	0,00
		- PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	0,00	0,00	0,00
		- PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	0,00	0,00	0,00
		- PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	0,00	0,00	0,00
		- PKB-Mobil Roda Tiga	0,00	0,00	0,00
	2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	0,00	0,00
		- BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	0,00	0,00	0,00
		- BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	0,00	0,00	0,00
		- BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	0,00	0,00	0,00
		- BBNKB-Mobil Bus-Microbus	0,00	0,00	0,00

No .	Pendapatan Daerah			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
					2024	2023
		-	BBNKB-Mobil Bus-Bus	0,00	0,00	0,00
		-	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	0,00	0,00	0,00
		-	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	0,00	0,00	0,00
		-	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	0,00	0,00	0,00
		-	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	0,00	0,00
		-	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	0,00	0,00	0,00
		-	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	0,00	0,00	0,00
		-	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	0,00	0,00	0,00
		-	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	0,00	0,00	0,00
		-	BBNKB-Mobil Roda Tiga	0,00	0,00	0,00
	3		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	0,00	0,00
		-	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	0,00	0,00	0,00
		-	PBBKB-Bahan Bakar Solar	0,00	0,00	0,00
		-	PBBKB-Bahan Bakar Gas	0,00	0,00	0,00
		-	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0,00	0,00	0,00
	4		Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00
	5		Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00
	6		Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Motel	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Gubuk Pariwisata	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Wisma Pariwisata	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Pesanggrahan	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	0,00
	7		Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Bar dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
	8		Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Tontonan Film	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00

No .	Pendapatan Daerah			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
					2024	2023
		-	Pajak Pameran	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00
	9		Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Reklame Kain	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Reklame Selebaran	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Reklame Berjalan	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Reklame Udara	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Reklame Apung	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Reklame Suara	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Reklame Film/Slide	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Reklame Peragaan	0,00	0,00	0,00
	10		Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00
	11		Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
	12		Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00
	13		Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00
	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Asbes	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Batu Tulis	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Batu Setengah Permata	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Batu Kapur	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Batu Apung	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Batu Permata	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Bentonit	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Dolomit	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Felspar	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Garam Batu (Halite)	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Grafit	0,00	0,00	0,00

No .	Pendapatan Daerah			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
					2024	2023
		-	Pajak Granit/Andesit	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Gips	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Kalsit	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Kaolin	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Leusit	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Magnesit	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Mika	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Marmer	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Nitrat	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Opsidien	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Oker	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Pasir Kuarsa	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Perlit	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Phospat	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Talk	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Tanah Diatome	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Tanah Liat	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Tawas (Alum)	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Tras	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Yarosif	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Zeolit	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Basal	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Trakit	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	0,00	0,00
		1 5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	0,00	0,00	0,00
		-	PBB-P2	0,00	0,00	0,00
		1 6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00
		-	BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	0,00	0,00
		-	BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	0,00	0,00
		1 7	Pajak Lingkungan - LRA	0,00	0,00	0,00
		-	Pajak Lingkungan - LRA	0,00	0,00	0,00
	(b)		Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
		1	Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00
		-	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
		-	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00
		-	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	0,00	0,00
		-	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00
		-	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00
		-	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00

No .	Pendapatan Daerah			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
					2024	2023
			- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Pelayanan Kependudukan	0,00	0,00	0,00
		2	Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Penyeberangan di Air	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00
		3	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	0,00	0,00	0,00
			- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00
			- Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan	0,00	0,00	0,00
	(c)		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
		1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00	0,00
			- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00	0,00

No .	Pendapatan Daerah			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
					2024	2023
		2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	0,00	0,00
		-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	0,00	0,00
		-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	0,00	0,00
		-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	0,00	0,00	0,00
		-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)	0,00	0,00	0,00
		-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)	0,00	0,00	0,00
		3	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,00	0,00	0,00
		-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,00	0,00	0,00
	(d)		Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
		1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
		2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00

No	Pendapatan Daerah			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
					2024	2023
		-	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
	3		Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil dari Bangun Guna Serah	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil dari Bangun Serah Guna	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
	4		Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00
	5		Jasa Giro	0,00	0,00	0,00
		-	Jasa Giro pada Kas Daerah	0,00	0,00	0,00
		-	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00	0,00
		-	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
		-	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00
		-	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00
	6		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
		-	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
	7		Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00
		-	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
	8		Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00
		-	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00
		-	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00
	9		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00
		-	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00
	10		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0,00	0,00	0,00
		-	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0,00	0,00	0,00
	11		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
		-	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
	12		Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00

No .	Pendapatan Daerah			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
					2024	2023
			- Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Pajak Lingkungan - LRA	0,00	0,00	0,00
		1 3	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00
		1 4	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00
			- Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00
		1 5	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	0,00
			- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00

No .	Pendapatan Daerah			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
					2024	2023
			-	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00
			-	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00
			-	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	0,00	0,00
			-	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	0,00	0,00
			-	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	0,00
			-	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LRA	0,00	0,00
		1 6		Pendapatan BLUD	0,00	0,00
			-	Pendapatan BLUD	0,00	0,00
		1 7		Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00
			-	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	0,00	0,00
			-	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	0,00
			-	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD	0,00	0,00
		1 8		Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00
			-	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00
		1 9		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00
			-	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00
		2 0		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	0,00
			-	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	0,00
		2 1		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00
			-	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00
		2 2		Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	0,00
			-	Pendapatan Zakat	0,00	0,00
		2 3		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00
			-	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00

No .	Pendapatan Daerah			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
					2024	2023
	2	4	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	0,00	0,00	0,00
		-	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	0,00	0,00	0,00
	2	5	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA	0,00	0,00	0,00
		-	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA	0,00	0,00	0,00
B	PENDAPATAN TRANSFER			0,00	0,00	0,00
	(a)		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
		1	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00
		-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00
		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00
		-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00
		-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00
		2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
		-	DID	0,00	0,00	0,00
		3	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
		-	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	0,00	0,00	0,00
		-	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat	0,00	0,00	0,00
		-	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	0,00	0,00	0,00
		-	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	0,00	0,00	0,00
		-	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	0,00	0,00	0,00
		4	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
		-	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0,00	0,00	0,00
		5	Dana Desa	0,00	0,00	0,00
		-	Dana Desa	0,00	0,00	0,00
	(b)		Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00
		1	Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
		-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00
		2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
		-	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00
		-	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00
		-	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

No .	Pendapatan Daerah			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
					2024	2023
		-	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			0,00	0,00	0,00
	(a)	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00
		1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
		-	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
		2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
		-	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
		3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
		-	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
		4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
		-	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
		-	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
		-	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
		-	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
		5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00
		-	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00
	(b)	Dana Darurat		0,00	0,00	0,00
		1	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
		-	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
	(c)	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00
		2	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00
		-	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
		-	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH				0,00	0,00	0,00

Untuk Pendapatan yang terealisasi kurang dari 70%, mohon dijelaskan, misal:
 “Realisasi Pendapatan (per sub rincian obyek) tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp.... atau X persen disebabkan oleh”

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b. Belanja	0,00	0,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2024 sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1) Belanja Operasi	0,00	0,00

Belanja Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 15.046.691.232,- dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Operasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2024	2023
(a)	Belanja Pegawai	3.374.265.518	3.173.907.355	2.916.287.612
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.028.513.618	2.028.513.618	1.802.683.614
-	Belanja Gaji Pokok ASN	1.403.425.018	1.403.425.018	1.284.013.400
-	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	137.852.800	137.852.800	130.975.322
-	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	143.125.700	143.125.700	145.650.000
-	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	76.536.800	76.536.800	15.120.000
-	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.406.700	30.406.700	30.940.000
-	Belanja Tunjangan Beras ASN	80.063.800	80.063.800	81.182.820
-	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	34.523.600	34.523.600	10.622.884
-	Belanja Pembulatan Gaji ASN	60.000	60.000	19.226
-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	108.647.300	108.647.300	93.589.623
-	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.904.800	2.904.800	2.642.598
-	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.914.300	8.914.300	7.927.741
-	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.052.800	2.052.800	0.00
-	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	0,00	0,00	0,00
-	Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00

No	Belanja Operasi		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2024	2023
	2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.249.691.900	1.249.691.900	1.043.993.998
	-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	990.086.900	990.086.900	837.288.834
	-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	0,00	0,00
	-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	259.605.000	259.605.000	206.705.164
	-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	0,00	0,00
	-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00
	3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	96.060.000	96.060.000	69.610.000
	-	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Honorarium	91.260.000	91.260.000	64.810.000
	-	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	-	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Uang Representasi DPRD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Tunjangan Beras DPRD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Uang Paket DPRD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Tunjangan Reses DPRD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00
	5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00

No	Belanja Operasi		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2024	2023
	-	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
	6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
	7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
	8	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00
(b)		Belanja Barang dan Jasa	12.199.926.251	12.199.926.251	9.282.933.616,11
	1	Belanja Barang	1.371.073.380	1.371.073.380	705.870.633
	-	Belanja Barang Pakai Habis	1.323.772.839	1.323.772.839	705.870.633
	-	Belanja Asset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	47.300.541	47.300.541	0,00
	-	Belanja Barang Tak Pakai Habis	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Barang Bekas Pakai	0,00	0,00	0,00
	2	Belanja Jasa	9.278.546.106	9.278.546.106	7.337.796.618,11
	-	Belanja Jasa Kantor	6.281.214.106	6.281.214.106	5.922.041.118,11
	-	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	336.632.000	336.632.000	198.000.000
	-	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.660.700.000	2.660.700.000	1.217.755.500
	-	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
	3	Belanja Pemeliharaan	451.562.000	451.562.000	447.543.546
	-	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00

No	Belanja Operasi		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2024	2023
	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	432.587.000	432.587.000	447.543.546
	-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Pemeliharaan Asset Tidak Berwujud	18.975.000	18.975.000	0,00
	-	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
4		Belanja Perjalanan Dinas	1.065.184.765	1.065.184.765	791.722.819
	-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.065.184.765	1.065.184.765	791.722.819
	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
5		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.560.000	33.560.000	0,00
	-	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.560.000	33.560.000	0,00
	-	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
6		Belanja Penunjang Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
7		Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
8		Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00
(c)		Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
1		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00
2		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
3		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00

No	Belanja Operasi		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2024	2023
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
	4	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
	5	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00	0,00
	6	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
(d)		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	1	Belanja Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00	0,00
	2	Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00
	3	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00	0,00
	4	Belanja Subsidi kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00
(e)		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00

No	Belanja Operasi		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2024	2023
	1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
	2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
	3	Belanja Hibah kepada BUMN	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah Jasa kepada BUMN	0,00	0,00	0,00
	4	Belanja Hibah kepada BUMD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah Jasa kepada BUMD	0,00	0,00	0,00
	5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00
	6	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	0,00	0,00	0,00
	7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00
(f)		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00
	2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00

No	Belanja Operasi		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2024	2023
	3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
	4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00
Jumlah			15.570.440.869	15.046.691.232	96,64%

Belanja Operasi terealisasi sebesar 96,64%

31 Desember 2024
(Rp)

31 Desember 2023
(Rp)

2) Belanja Modal

0,00

0,00

Belanja Modal Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2024 Rp. 921.700.120,- dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Modal		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2024	2023
(a)	Belanja Modal Tanah				
	1	Belanja Modal Tanah			
	-	Belanja Modal Tanah Persil			
	-	Belanja Modal Tanah Non Persil			
	-	Belanja Modal Lapangan			
	2	Belanja Modal Tanah BOS			
	3	Belanja Modal Tanah BLUD			
(b)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		984.407.859	921.700.120	93,63%
	1	Belanja Modal Alat Besar			
	-	Belanja Modal Alat Besar Darat			
	-	Belanja Modal Alat Besar Apung			
	-	Belanja Modal Alat Bantu			
	2	Belanja Modal Alat Angkutan			
	-	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor			
	-	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			

No		Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2024	2023
	-	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor			
	-	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor			
	-	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara			
	3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur			
	-	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin			
	-	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin			
	-	Belanja Modal Alat Ukur			
	4	Belanja Modal Alat Pertanian			
	-	Belanja Modal Alat Pengolahan			
	5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	242.486.597	242.486.597	26.085.000
	-	Belanja Modal Alat Kantor	83.613.676	83.616.676	0,00
	-	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	145.615.081	145.615.081	10.765.000
	-	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.257.840	13.257.840	15.320.000
	6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	182.000.380	182.000.380	147.800.000
	-	Belanja Modal Alat Studio	154.268.362	154.268.362	143.650.000
	-	Belanja Modal Alat Komunikasi	27.732.018	27.732.018	4.150.000
	-	Belanja Modal Peralatan Pemancar			
	-	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi			
	7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan			
	-	Belanja Modal Alat Kedokteran			
	-	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum			
	8	Belanja Modal Alat Laboratorium			
	-	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium			
	-	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir			
	-	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah			
	-	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika			
	-	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan			
	-	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya			
	-	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup			
	-	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica			
	-	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi			
	9	Belanja Modal Alat Persenjataan			
	-	Belanja Modal Senjata Api			
	-	Belanja Modal Non Senjata Api			
	-	Belanja Modal Senjata Sinar			
	10	Belanja Modal Komputer	559.920.882	559.920.882	178.094.600
	-	Belanja Modal Komputer Unit	402.067.226	402.067.226	152.915.600
	-	Belanja Modal Peralatan Komputer	157.853.656	157.853.656	25.179.000
	11	Belanja Modal Alat Eksplorasi			

No		Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2024	2023
		- Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi			
		- Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika			
	1	Belanja Modal Alat Pengeboran			
	2				
		- Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin			
		- Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin			
	1	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian			
	3				
		- Belanja Modal Sumur			
		- Belanja Modal Produksi			
		- Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian			
	1	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi			
	4				
		- Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi			
		- Belanja Modal Alat Bantu Produksi			
	1	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja			
	5				
		- Belanja Modal Alat Deteksi			
		- Belanja Modal Alat Pelindung			
		- Belanja Modal Alat SAR			
		- Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan			
	1	Belanja Modal Alat Peraga			
	6				
		- Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan			
	1	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi			
	7				
		- Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi			
	1	Belanja Modal Rambu-Rambu			
	8				
		- Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat			
		- Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara			
		- Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut			
	1	Belanja Modal Peralatan Olahraga			
	9				
	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS			
	0				
	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD			
	1				
(c)		Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
	1	Belanja Modal Bangunan Gedung			
		- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja			
		- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal			
	2	Belanja Modal Monumen			
		- Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti			
	3	Belanja Modal Bangunan Menara			
		- Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan			
	4	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti			
		- Belanja Modal Tugu/Tanda Batas			
	5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS			

No	Belanja Modal		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2024	2023
	6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD			
(d)		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
	1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan			
		- Belanja Modal Jalan			
		- Belanja Modal Jembatan			
	2	Belanja Modal Bangunan Air			
		- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi			
		- Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut			
		- Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder			
		- Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam			
		- Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah			
		- Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku			
		- Belanja Modal Bangunan Air Kotor			
	3	Belanja Modal Instalasi			
		- Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku			
		- Belanja Modal Instalasi Air Kotor			
		- Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah			
		- Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan			
		- Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik			
		- Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik			
		- Belanja Modal Instalasi Pertahanan			
		- Belanja Modal Instalasi Gas			
		- Belanja Modal Instalasi Pengaman			
		- Belanja Modal Instalasi Lain			
	4	Belanja Modal Jaringan			
		- Belanja Modal Jaringan Air Minum			
		- Belanja Modal Jaringan Listrik			
		- Belanja Modal Jaringan Telepon			
		- Belanja Modal Jaringan Gas			
	5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Instalasi BOS			
	6	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Instalasi BLUD			
(e)		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
	1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan			
		- Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak			
		- Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro			
		- Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan			
		- Belanja Modal Musik			
		- Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)			
		- Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita			
		- Belanja Modal Tarscalt			
	2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga			

No	.	Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2024	2023
	-	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian			
	-	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan			
	-	Belanja Modal Tanda Penghargaan			
	3	Belanja Modal Hewan			
	-	Belanja Modal Hewan Piaraan			
	-	Belanja Modal Ternak			
	-	Belanja Modal Hewan Lainnya			
	4	Belanja Modal Biota Perairan			
	-	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)			
	-	Belanja Modal Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)			
	-	Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)			
	-	Belanja Modal Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)			
	-	Belanja Modal Echinodermata (Teripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)			
	-	Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)			
	-	Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)			
	-	Belanja Modal Mamalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)			
	-	Belanja Modal Algae (Rumput Laut dan Tumbuhan Lain yang Hidup di Dalam Air)			
	-	Belanja Modal Biota Perairan Lainnya			
	5	Belanja Modal Tanaman			
	6	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya			
	7	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi			
	8	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud			
	9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS			
	10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD			
Jumlah			984.407.859	921.700.120	93,63%

Jumlah tersebut termasuk:

- Realisasi Belanja Modal Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berasal dari Belanja yang terdiri dari (*Ex :Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 984.407.859 terealisasi sebesar Rp. 921.700.120 atau sebesar 93,63%*

2. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a. Aset	0,00	0,00

Saldo Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.266.136.905,- dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
(1)	Aset Lancar	126.290.544	126.290.544
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	2.495.309.498	2.495.309.498
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	644.536.863	644.536.863
Jumlah Aset		3.266.136.905	3.266.136.905

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1) Aset Lancar	0,00	0,00

Saldo Aset Lancar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2024 sebesar Rp.. 126.290.544, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
(a)	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
(b)	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
(c)	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
(d)	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
(e)	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
(f)	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
(g)	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00

(h)	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
(i)	Piutang Lainnya	0,00	0,00
(j)	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
(k)	Beban Dibayar Dimuka	77.840.250	77.840.250
(l)	Persediaan	48.450.294	48.250.294
(m)	Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
(n)	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
a) Kas	0,00	0,00

Saldo Kas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)

b) Piutang Retribusi	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------

Saldo Piutang Retribusi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 terdiri dari nihil dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis	Nilai (Rp)
(a)	Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan	0,00
-	Mayat	0,00

No	Jenis	Nilai (Rp)
-	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	0,00
-	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00
-	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00
-	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00
-	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00
-	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00
-	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00
-	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	0,00
(b)	Piutang Retribusi Jasa Usaha	0,00
-	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00
-	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00
-	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	0,00
-	Piutang Retribusi Terminal	0,00
-	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00
-	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	0,00
-	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00
-	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00
-	Piutang Retribusi Penyeberangan di Air	0,00
-	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00
(c)	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00
-	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00
-	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00
-	Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00
-	Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00
-	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	0,00
-	Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00
-	Piutang Retribusi Izin Gangguan	0,00
JUMLAH		0,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
c) Piutang lain-lain	0,00	0,00

Saldo piutang lain-lain Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1		0,00
2		0,00
3		0,00
Jumlah		0,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
d) Persediaan	0,00	0,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 48.450.294,- dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	0,00
2	Bahan Kimia	0,00
3	Bahan Peledak	0,00
4	Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00
5	Bahan Baku	0,00
6	Bahan Kimia Nuklir	0,00
7	Barang Dalam Proses	0,00
8	Bahan/Bibit Tanaman	0,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
9	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00
10	Isi Tabung Gas	0,00
11	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00
12	Bahan Lainnya	0,00
13	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00
14	Suku Cadang Alat Besar	0,00
15	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00
16	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00
17	Suku Cadang Alat Pemancar	0,00
18	Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi	0,00
19	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00
20	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00
21	Suku Cadang Alat Persenjataan	0,00
22	Persediaan Dari Belanja Bantuan Sosial	0,00
23	Suku Cadang Lainnya	0,00
24	Alat Tulis Kantor	6.194.660
25	Kertas Dan Cover	12.415.380
26	Bahan Cetak	16.632.226
27	Benda Pos	0,00
28	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00
29	Bahan Komputer	885.000
30	Perabot Kantor	5.986.770
31	Alat Listrik	6.832.950
32	Perlengkapan Dinas	0,00
33	Kaporlap Dan Perlengkapan Satwa	0,00
34	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00
35	Suvenir/Cendera Mata	0,00
36	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00
37	Obat	0,00
38	Obat-Obatan Lainnya	0,00
39	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
40	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00
41	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00
42	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0,00
43	Natura	0,00
44	Pakan	0,00
45	Natura Dan Pakan Lainnya	0,00
46	Persediaan Penelitian Biologi	0,00
47	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00
48	Persediaan Penelitian Teknologi	0,00
49	Persediaan Dalam Proses	0,00
50	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00
	JUMLAH	48.946.986

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2) Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Investasi jangka Panjang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2024 sebesar nihil.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3) Aset Tetap	0,00	0,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

N o	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
(a)	Tanah	0,00	0,00

N o	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
(b)	Peralatan dan Mesin	10.581.583.589	10.581.583.589
(c)	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
(g)	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
Jumlah Aset		10.581.583.589	10.581.583.589

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar 0,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2024 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2023 (Rp0,00-Rp0,00)dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a) Tanah	0,00	0,00

Saldo Tanah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2024

Penambahan Aset Tetap Tanah

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal

Hibah

Mutasi 166.800.000

Reklasifikasi

Koreksi +

Jumlah penambahan	166.800.000	
Pengurangan Aset Tetap Tanah		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(307.883.000)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....) +	
Jumlah Pengurangan		(307.883.000) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		

Koreksi tambah aset tetap tanah sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-		
-		
-		
-		
-	 +	
Total Koreksi Tambah		

Koreksi kurang aset tetap tanah sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)
-	(.....)

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
Total Koreksi Kurang		(.....)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
b) Peralatan dan Mesin	11.362.200.709	10.581.583.589

Saldo peralatan dan mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 11.362.200.709 dengan perincian sebagai berikut. Rincian dapat dilihat pada *(lampiran mutasi aset tetap 2024)*

Saldo Awal Per 1 Januari 2024 **10.581.583.589**

Penambahan Peralatan dan Mesin

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Hibah

Mutasi 921.700.120

Reklasifikasi

Koreksi +

Jumlah penambahan 921.700.120

Pengurangan Peralatan dan Mesin

Penghapusan (.....)
)

Mutasi	(141.083.000)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(..... +)	
Jumlah Pengurangan		(780.617.120) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		11.362.200.709

Koreksi tambah aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp.141.083.000 dengan rincian sebagai berikut:

-		
-		
-		
-		
-	 +	
Total Koreksi Tambah		(.....)

Koreksi kurang aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....) +	

	<u>Total Koreksi Kurang</u>	(.....)
	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	(Rp)	(Rp)
c) Gedung dan Bangunan	473.152.967	473.152.967

Saldo gedung dan bangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2024 sebesar Rp 473.152.967 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2024

Penambahan Gedung dan Bangunan

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi

Koreksi +

Jumlah penambahan

Pengurangan Gedung dan Bangunan

Penghapusan (.....)

Mutasi (.....)

Hibah (.....)

Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(..... +	
	)	
Jumlah Pengurangan		(.....) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		473.152.967,-

Koreksi tambah aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-		
-		
-		
-		
-	 +	
Total Koreksi Tambah		

Koreksi kurang aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....) +	
Total Koreksi Kurang		(.....)

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	0,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2024

Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi

Koreksi +

Jumlah penambahan

Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Penghapusan (.....)

Mutasi (.....)

Hibah (.....)

Reklasifikasi (.....)

Koreksi (.....) +

Jumlah Pengurangan (.....) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2024

Koreksi tambah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.....
dengan rincian sebagai berikut:

-		
-		
-		
-		
-		+
Total Koreksi Tambah		(.....)

Koreksi kurang aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.....
dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
Total Koreksi Kurang		(.....)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
e) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2024

Penambahan Aset Tetap Lainnya

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi

Koreksi

+

Jumlah penambahan**Pengurangan Aset Tetap Lainnya**

Penghapusan

(.....
)

Mutasi

(.....
)

Hibah

(.....
)

Reklasifikasi

(.....
)

Koreksi

(..... +
)

Jumlah Pengurangan

(.....) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2024

Koreksi tambah aset tetap Lainnya sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-

-		
-		
-		
-		+
Total Koreksi Tambah		

Koreksi kurang aset tetap Lainnya sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
Total Koreksi Kurang		(.....)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 *NIHIL* sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KONSTRUKSI	Nomor Kontrak	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Misal:Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi		0,00	0,00

2				
	JUMLAH		0,00	0,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
g) Akumulasi Penyusutan	9.335.881.050	8.559.427.058

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 776.453.992 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	<i>Peralatan Dan Mesin</i>	9.156.800.758	0,00
3	<i>Gedung dan Bangunan</i>	179.080.292	0,00
2	<i>Jalan, Jaringan dan Irigasi</i>	0,00	0,00
	JUMLAH	9.335.881.050	8.559.427.058

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Awal Per 1 Januari 2024 **8.559.427.058**

Penambahan Akumulasi penyusutan

Beban Penyusutan

Beban Penyusutan 9.156.800.758
Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan 179.080.292
Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Jalan,
Jaringan dan Irigasi +

9.335.881.050

Reklasifikasi

Koreksi 776.453.992 +

Jumlah penambahan	776.453.992
Pengurangan Akumulasi penyusutan	
Reklasifikasi (.....)	
Koreksi (.....) +	
Jumlah Pengurangan	(.....) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	9.335.881.050

Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-		
-		
-		+
Total Koreksi Tambah		

Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
Total Koreksi Kurang	(.....)	

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
4) Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5) Aset Lainnya	0,00	0,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	0,00	0,00
(b)	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset	0,00	0,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar 0,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2024 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2023 (Rp0,00-Rp0,00)dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a) Aset Tak Berwujud	644.536.863	644.536.863

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 644.536.863 merupakan software dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2024 **644.536.863**

Penambahan Aset Tak Berwujud

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	
Hibah	
Mutasi	
Reklasifikasi	

Koreksi +

Jumlah penambahan

Pengurangan Aset Tak Berwujud

Penghapusan (.....)

Mutasi (.....)

Hibah (.....)

Reklasifikasi (.....)

Koreksi (.....) +

Jumlah Pengurangan +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2024

Koreksi tambah Aset Tidak Berwujud sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-

-

-

-

- +

Total Koreksi Tambah

Koreksi kurang Aset Tidak Berwujud sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

- (.....)

- (.....)

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
Total Koreksi Kurang		(.....)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
b) Aset Lain-lain	0,00	0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 *(jika ada/ jika tidak ada ditulis nihil)* sebesar Rp.644.536.863, terdiri dari *asset tak berwujud*. dengan perincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2024

Penambahan Aset Lain-Lain

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi

Koreksi +

Jumlah penambahan

Pengurangan Aset Lain-lain

Penghapusan (.....)

Mutasi (.....)

Hibah (.....)

Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....) +	
Jumlah Pengurangan		(.....) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		644.536.863,-

Koreksi tambah Aset Lain-lain sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-		
-		
-		
-		
-	 +	
Total Koreksi Tambah		

Koreksi kurang Aset Lain-lain sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....) +	
Total Koreksi Kurang		(.....)

Rincian saldo aset lain-lain sebesar Rp. 644.536.863 sebagai berikut:

Nomor	Aset	Rusak	Hibah
1	<i>Misal:Meubelair</i>		
2			
3			
Jumlah		0,00	0,00

Untuk perolehan aset tetap melalui Belanja modal tahun 2024 terdapat aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset tersebut dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan digolongkan dalam daftar aset dibawah batasan minimal kapitalisasi aset (Daftar Aset Ekstrakomptabel) dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Aset	Jumlah Unit	Rupiah
1	<i>Software/Aplikasi</i>		644.536.863
2			
3			
Jumlah		0,00	644.536.863

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b. Kewajiban	0,00	0,00

Saldo Kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2024 adalah sebesar *(jika ada/ jika tidak ada ditulis nihil)* Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar.yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 90.343.100 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 90.343.100. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan fihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Utang Belanja	90.343.100
(b)		0,00
(c)		0,00
Jumlah Hutang		90.343.100

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar *nihil*.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
c. Ekuitas	0,00	0,00

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD sebesar Rp. 3.175.793.805,-

3. Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2024 yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/ Defisit Operasional.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a. Pendapatan LO	0,00	0,00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp..... lebih besar Rp..... atau% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut, nihil.

N o	Pendapatan Daerah	2024 (Rp)	2023 (Rp)
(1)	Pendapatan Asli Daerah - LO	0,00	0,00
	- Pendapatan Pajak - LO		
	- Pendapatan Retribusi - LO		
	-		
(2)	Pendapatan Transfer - LO	0,00	0,00
	-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		
	-.....		
(3)	Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	0,00	0,00
	-Pendapatan Hibah - LO		
	-.....		
Jumlah		0,00	0,00

Terdapat selisih antara Pendapatan LRA dengan Pendapatan LO yaitu sebesar Rp..... (Rp... - Rp...), perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan – LRA **Rp.**

Penambahan:

1. Piutang Murni (2024) Rp
2. Pendapatan Hibah – LO Rp
3. Koreksi Kurang Catat
Pendapatan - LO Rp

Jumlah Penambahan **Rp.**

Pengurangan:

4. Setoran Piutang tahun
sebelumnya (Rp)

5. Pendapatan Diterima
Dimuka (Rp)

6. Koreksi Lebih Catat
Pendapatan - LO (Rp)

Jumlah Pengurangan (Rp.)

Pendapatan - LO Rp.

1) Piutang Murni (2024) sebesar Rp terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp.
b. Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.
d. Lain-lain PAD Yang Sah	Rp.

JUMLAH Rp.

2) Pendapatan Hibah – LO sebesar Rp Terdiri dari:

a.	Rp.
b.	Rp.
c.	Rp.
d.	Rp.

JUMLAH Rp.

3) Koreksi Kurang Catat Pendapatan – LO sebesar Rp..... Terdiri dari:

a.	Rp.
b.	Rp.
c.	Rp.
d.	Rp.

JUMLAH Rp.

4) Setoran Piutang tahun sebelumnya sebesar Rp..... Terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp.
b. Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.
d. Lain-lain PAD Yang Sah	Rp.
JUMLAH	Rp.

5) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp..... terdiri dari:

a. Sewa Gedung Serba Guna	Rp.
b. Sewa Tanah dan Bangunan	Rp.
JUMLAH	Rp.

6) Koreksi Lebih Catat Pendapatan – LO sebesar Rp..... terdiri dari:

a.	Rp.
b.	Rp.
c.	Rp.
d.	Rp.
JUMLAH	Rp.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
b. Beban	0,00	0,00

Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 13.293.394.176,11 lebih besar Rp. 13.293.394 atau 100% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 0,00,- dengan rincian sebagai berikut.

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.261.221.720,- lebih besar Rp. 415.624.601 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 2.936.400.884 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Pegawai - LO	Saldo (Tahun 2024)	Saldo (Tahun 2023)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	0,00	0,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	66.841.799	0,00

4.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	17.575.268	0,00
5.	Belanja luran Jaminan Kesehatan P3K	100.706	0,00
6.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	3.376.683	0,00
7.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS (P3K)	495.400	0,00
8.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (P3K)	2.022.243	0,00
Jumlah Total		90.412.099	0,00

Beban Pegawai pada LO sebesar Rp. 2.936.400.884 Tidak sama dengan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp. 3.374.265.518 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 437.864.634,- Selisih tersebut merupakan beban yang harus dibayar pada periode laporan keuangan selanjutnya.

2) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 11.382.940.318 lebih besar Rp. 2.157.419.394,9 atau 21,57% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 9.225.520.923,11 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Barang dan Jasa - LO	Saldo (Tahun 2024)	Saldo (Tahun 2023)
1.	Beban Barang	1.342.217.490	664.428.439
2.	Beban Jasa	8.803.713.443	7.351.826.119
3.	Beban Pemeliharaan	420.311.360	447.543.546
4.	Beban Perjalanan Dinas	785.618.025	791.722.819
5.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.080.000	0,00
6.	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00
7.	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
Jumlah Total		11.382.940.318	9.225.520.923,11

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama.

Total Nilai Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 11.382.940.318 tidak sama dengan Belanja Barang dan Jasa di LRA sebesar Rp. 12.199.926.251 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 816.985.933. Hal ini dikarenakan timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan

penurunan umur manfaat atau potensi jasa, dan lain-lain. Selisih sebesar Rp. 816.985.933 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa – LRA **Rp.12.199.926.251**

Penambahan

1	Beban dari Persediaan Awal (1 Januari 2024) Barang dan Jasa	Rp.	48.450.294
2	Utang Beban Barang Jasa	Rp.	25.366
3	Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal	Rp.	10.145.930.933
4	Beban dibayar dimuka (beban sewa rumah jabatan/dinas)	Rp.	27.848.417
5	Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Hibah	Rp.	
6	Koreksi Lebih Catat Utang Beban Barang dan Jasa	Rp.	

Jumlah Penambahan

Rp. 10.221.017.143

Pengurangan

7	Beban dari Persediaan Akhir (31 Desember 2024) Barang dan Jasa	Rp	(48.946.986)
8	Pembayaran Utang Beban Barang dan Jasa 2024	Rp	(391.666)
9	Pengakuan Aset dari Belanja Barang dan Jasa	Rp(.....)	
1	Koreksi Kurang Catat	Rp(.....)	
0	Utang Beban Barang dan Jasa		

Jumlah Pengurangan

Rp(49.338.652)

Beban Barang dan Jasa – LO

Rp. 816.985.933

1. Beban dari Persediaan Awal sebesar Rp. 48.450.294 berasal dari:

a Beban Bahan Pakai Habis Rp

b	Beban Persediaan Bahan/ Material	Rp
.		
c	Beban Cetak dan Penggandaan	Rp
.		
d	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp
.		
e	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Rp
.		
f.	Beban Barang Yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	Rp
JUMLAH		Rp 48.450.294

2. Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 25.366 merupakan kewajiban yang timbul pada bulan Desember 2023 dan masih harus dibayar pada bulan Januari 2024 yang nantinya akan berpengaruh pada Beban Jasa Kantor diantaranya:

	Utang Beban Telepon	Rp 25.366
a.		
	Utang Beban Air	Rp
b.		
	Utang Beban Listrik	Rp
c.		
	Utang Beban Surat Kabar/ Majalah	Rp
d.		
	Utang Beban Faximili, Internet	Rp
e.		
f.	Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp
g	Utang Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp
JUMLAH		Rp 25.366

3. Sedangkan Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal sebesar Rp. 921.700.120 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a	Beban Bahan Habis	Rp 324.798.490
.	Pakai	
	- Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp 324.798.490
	- dst	Rp
b	Beban Persediaan	Rp 48.946.986
.	Bahan Material	

- Beban Persediaan Rp
- Bahan Baku
- Bangunan
- dst Rp
- c Dst Rp
- dst Rp

JUMLAH **Rp. 373.745.476**

4. Beban Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp. 26.244.250 merupakan beban sewa jasa konversi aplikasi, pemeliharaan aset tidak berwujud/software, beban kawat/faksimili/internet/tv berlangganan pada bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka			
	Uraian	Saldo (Rp)	Berakhir
a)	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp 1.604.167,00	21 Mei 2025
b)	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp 0,00	28 Januari 2025
a)	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud/Software	Rp 283.333,00	19 Maret 2025
b)	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 8.571.750,00	9 Desember 2025
a)	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud/Software	Rp 15.785.000,00	9 Desember 2025
	Jumlah Berakhir 2025	Rp 26.244.250,00	

5. Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Hibah sebesar Rp.0,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hibah Obat-obatan Rp
- b. Hibah Kendaraan Bermotor Rp
- c. dst Rp

JUMLAH **Rp**

6. Koreksi kurang catat utang beban barang dan jasa sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a Utang Beban Telepon
 - Data Utang Beban Telepon Rp
 - awal

- Pembayaran Utang Beban Telepon	Rp (.....)	
Kurang Catat Saldo Awal Beban Telepon		Rp
b Utang Beban Air		
- Data Utang Beban Air Awal	Rp	
- Pembayaran Utang Beban Air	Rp (.....)	
Kurang Catat Saldo Awal Beban Air		Rp
JUMLAH		Rp

7. Beban dari Persediaan Akhir (31 Desember 2024) Barang dan Jasa sebesar Rp. 48.946.986 dengan rincian sebagai berikut.

a Beban Barang Pakai Habis	Rp	48.946.986
.		
b Beban Barang Tak Habis Pakai	Rp	
.		
c Beban Barang Bekas Dipakai	Rp	
.		
i. Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp	
- Beban Barang Pakai Habis	Rp	
- Beban Barang Tak Habis Pakai	Rp	
- Beban Barang Bekas Dipakai	Rp	
JUMLAH		Rp 48.946.986

8. Pembayaran Utang Beban Barang dan Jasa 2024 sebesar Rp. 391.666 dengan rincian sebagai berikut.

a Utang Beban Telepon	Rp	391.666
.		
b Utang Beban Air	Rp	
.		
c Utang Beban Listrik	Rp	
.		

d	Utang Beban Surat Kabar/ Majalah	Rp
.		
e	Utang Beban Faximili, Internet	Rp
.		
f.	Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp
g	Utang Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp
.		
JUMLAH		Rp 391.666

9. Pengakuan Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.....

dapat dijelaskan sebagai berikut.

a	Beban Barang Pakai Habis	Rp
.		
	- Beban Bahan	Rp
	- dst	Rp
b	Beban Barang Tak Habis	Rp
.	Pakai	
	- Beban Komponen	Rp
	- dst	Rp
c	Beban Barang Bekas	Rp
	Dipakai	
	- dst	Rp
JUMLAH		Rp

10.Koreksi Lebih Catat pembebanan Utang Beban Barang dan Jasa tahun

2024 sebesar Rp..... antara lain terdiri dari:

a	Utang Beban Telepon	
.		
	- Data Utang Beban Telepon awal	Rp
	- Pembayaran Utang Beban Telepon	Rp (.....)
	Lebih Catat Saldo Awal Beban Telepon	<u> </u> Rp

b Utang Beban Air

- Data Utang Beban Air Awal Rp

- Pembayaran Utang Beban Air Rp (.....)

Lebih Catat Saldo Awal Beban Air Rp

JUMLAH

Rp

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan saldo Beban Hibah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp..... lebih besar Rp..... atau% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp.....dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Hibah - LO	Saldo (Tahun 2024)	Saldo (Tahun 2023)
1.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3.	Beban Hibah kepada BUMN	0,00	0,00
4.	Beban Hibah Uang kepada BUMD	0,00	0,00
5.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00
6.	Beban Hibah Dana BOS	0,00	0,00
7.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	0,00
Jumlah Total		0,00	0,00

(diisi sesuai yang ada dimasing-masing SKPD/hapus item yang tidak ada)

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan saldo Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp..... lebih besar Rp..... atau% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp.....dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Bantuan Sosial	Saldo (Tahun 2024)	Saldo (Tahun 2023)
1.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	0,00	0,00
2.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	0,00	0,00

3.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
4.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00
Jumlah Total		0,00	0,00

(diisi sesuai yang ada dimasing-masing SKPD/hapus item yang tidak ada)

5) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp..... lebih besar Rp..... atau% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Penyisihan Piutang	Saldo (Tahun 2024)	Saldo (Tahun 2023)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
3.	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	0,00	0,00
4.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00
5.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
6.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
7.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Total		0,00	0,00

(diisi sesuai yang ada dimasing-masing SKPD/hapus item yang tidak ada)

6) **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain merupakan Beban Lain-lain periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp..... lebih besar Rp..... atau% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Lain-lain	Saldo (Tahun 2024)	Saldo (Tahun 2023)
1.	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	0,00
2.	Beban Lain-lain	0,00	0,00

Jumlah Total	0,00	0,00
---------------------	-------------	-------------

(diisi sesuai yang ada dimasing-masing SKPD/hapus item yang tidak ada)

7) **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan adalah Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan sebelum Tahun Anggaran 2024, sedangkan belanja modal tahun 2024 telah dilakukan penyusutan pada posisi per 31 Desember 2024.

Saldo beban penyusutan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 895.545.355 lebih kecil Rp. 283.767.264 atau 28,37% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 1.179.312.619 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Penyusutan	Saldo (Tahun 2024)	Saldo (Tahun 2023)
1.	<i>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</i>	0,00	1.170.114.070
	- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	53.655.000	0,00
	- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.328.572	101.295.427
	- Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	12.673.767	0,00
	- Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	192.983.834	0,00
	- Beban Penyusutan Rumah Tangga-Mebel	7.378.690	448.309.367
	- Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	358.333	116.767.487
	- Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat pendingin	7.731.104	0,00
	- Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	2.199.167	0,00
	- Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga Lainnya (home use)	95.337.497	0,00
	- Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	224.750	0,00
	- Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	3.053.750	0,00
	- Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat- Pejabat-Kursi Hadap Meja Kerja Pejabat	945.000	0,00
	- Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	2.081.250	0,00
	- Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	47.828.168	0,00
	- Beban Penyusutan Alat Syudio-Peralatan Studio, Video dan Film	46.296.352	0,00
	- Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	11.183.152	0,00

No.	Rincian Beban Penyusutan	Saldo (Tahun 2024)	Saldo (Tahun 2023)
	- Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	218.884.360	0,00
	- Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	14.777.000	0,00
	- Beban Penyusutan Peralatan Komputer – Peralatan Personal Computer	46.353.451	0,00
	- Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	92.758.338	0,00
	- Beban Penyusutan Ramu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak berduar	28.315.271	475.426.518
	- Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	0,00	0,00
	- Beban Penyusutan Alat Pengeboran	0,00	0,00
	- Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00
	- Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00
	- Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00
	- Beban Penyusutan Alat Peraga	0,00	0,00
	- Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00
	- Beban Penyusutan Rambu-Rambu	0,00	28.315.271
	- Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	0,00	0,00
2.	<i>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</i>	0,00	0,00
	- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.562.141	0,00
	- Beban Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Gedung Tempat Pertemuan	1.167.474	0,00
	- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.468.934	0,00
	- Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00
3.	<i>Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan</i>	0,00	9.198.549
	- Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
	- Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0,00	9.198.549
	- Beban Penyusutan Instalasi	0,00	0,00
Jumlah Total		895.545.355	1.179.312.619

c. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.15.992.192.393 lebih besar Rp.2.698.798.216,89 atau 20,30% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 13.293.394.176,11

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 merupakan nol sedangkan saldo tahun 2023 sebesar Rp0,00.

e. **Surplus/Defisit - LO**

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp.15.992.192.393 sedangkan saldo tahun 2023 sebesar Rp. 13.293.394.176,11

4. **Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Rincian Laporan Perubahan Ekuitas	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Saldo Ekuitas Awal	3.175.793.805	4.379.436.178
2.	Surplus/defisit – LO	(15.992.192.393)	(13.293.394.176,11)
3.	Koreksi Ekuitas	21.991.637	475.479.025
4.	Ekuitas akhir	3.130.001.127	3.175.793.805

Koreksi Ekuitas sebesar Rp. 21.991.637 yang merupakan koreksi ekuitas lainnya, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Tambah Ekuitas :

-		
-		
-		
-		+

Total Koreksi Tambah

Koreksi Kurang Ekuitas :

-	Koreksi Ekuitas lainnya	(21.991.637)
-		(.....)
-		(.....)

-	(.....)	+	
Total Koreksi Kurang			(21.991.637) +
Total Koreksi Ekuitas			21.991.637

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

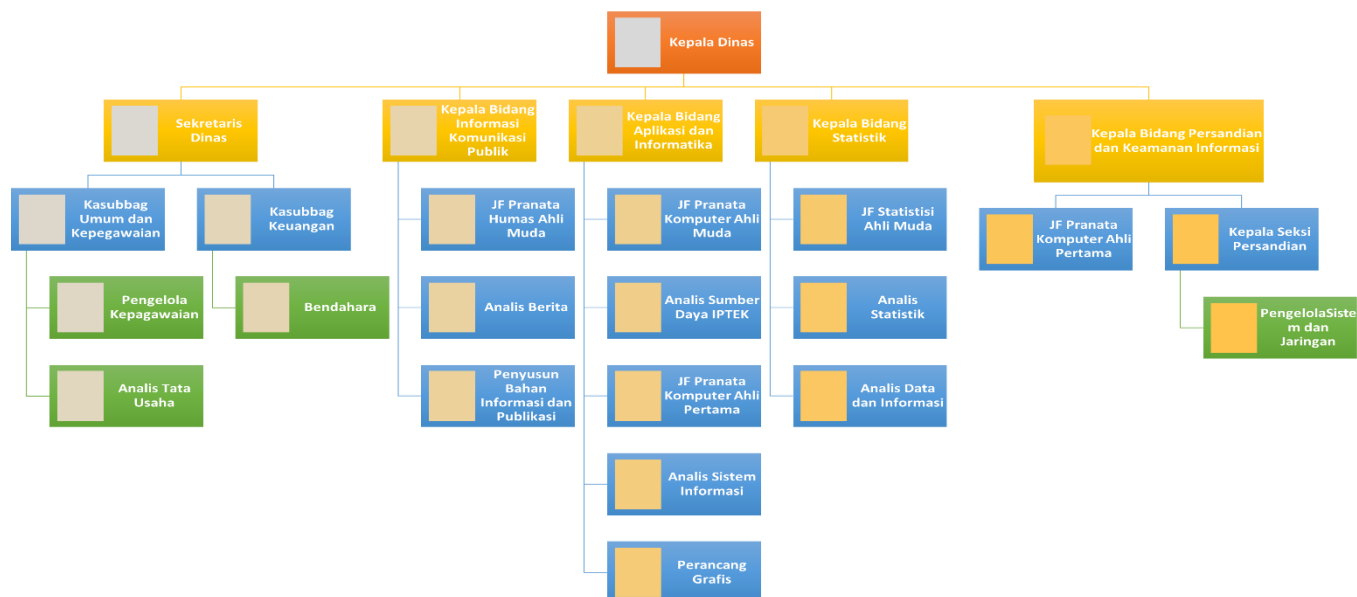
1. Penjelasan Umum

a. Informasi Umum Tentang Entitas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022, dimana wajib menjalankan fungsi komunikasi dan informatikanya yang disebut sebagai urusan konkuren wajib non pelayanan dasar, karena tidak secara langsung memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Diskominfoitksan mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan pengawaswan mterhadap urusan : komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pada OPD di Kabupaten Blitar. Kewajiban melakukan pembinaan ini dibagi menjadi beberapa aspek. Pertama pembinaan dalam bentuk fasilitasi, dalam arti membantu OPD yang menjadi sektor binaannya agar mampu beroperasi secara maksimal. Kedua yaitu model pembinaan secara regulasi agar OPD terkait memiliki kemampuan/ruang/atmosfer untuk bergerak dan berinovasi. Tak hanya itu Dinas Kominfotiksan juga melakukan pengawasan penyelenggaraan sektor, apakah sudah sesuai dengan masterplan SPBE atau belum, sehingga Dinas Kominfotiksan merupakan perpanjangan transformasi digital pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara efektif dan efisien. Terkait hal ini diharapkan dinas Kominfotiksan mendapat sumber pembiayaan lain selain dari APBD.

b. Struktur Organisasi



2. Informasi Lainnya

Selama tahun 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar terjadi hal-hal penting yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan ini, sebagai berikut:

1. Pengembalian ke Kas Daerah berupa kelebihan pembayaran honorarium narasumber dan moderator sebesar Rp.4.600.000 dan sudah dipenuhi sebagaimana rekomendasi, adapun bukti telah terlampir dalam e-audit;
2. Pengembalian ke Kas Daerah berupa kelebihan pembayaran belanja cetak buku sebesar Rp.3.914.000 dan sudah dipenuhi sebagaimana rekomendasi, adapun bukti telah terlampir dalam e-audit;

a. Penjelasan Realisasi APBD untuk Penanganan COVID-19

APBD untuk penanganan COVID-19 yang telah diterima oleh SKPD..... sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
I. Bidang Kesehatan				
A.	Penanganan COVID-19			
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (DBHCHT RS Srengat)			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
2	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DBHCHT RS Srengat)			
3	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DBHCHT RS Ngudi Waluyo Wlingi)			
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (DBHCHT Dinkes)			
5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DBHCHT Dinkes)			
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
7	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (KEBUTUHAN RUMAH ISOLASI)			
8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			
9	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			
11	Belanja Tidak Terduga			
12	BMHP dan Obat RSUD Srengat			
13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan			
14	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik			
15	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
16	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
17	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
18	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
19	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Subtotal			
B. Dukungan Vaksinasi				
1	Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi			
2	Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi			
3	Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin			
4	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi			
	Subtotal			
C. Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19				
1	Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban			
	Subtotal			
D. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19				
	a. Dokter Spesialis			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
	b. Dokter umum dan dokter gigi			
	c. Bidan dan perawat			
	d. Tenaga kesehatan lainnya			
	Subtotal			
E.	Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas			
1	Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat)			
	Subtotal			
	Total Bidang Kesehatan			
II.	Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi			
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
2	Subsidi pertanian			
3	Pembangunan Prasarana Pertanian			
4	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
5	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
6	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
8	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
9	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
10	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil			
11	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
12	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
13	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
14	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
15	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
16	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
17	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			
18	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			
19	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
20	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
21	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
22	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
23	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
24	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
	Total Penanganan Dampak Ekonomi			
III.	Bantuan Sosial Safety Net/Jaring Pengaman Sosial			
1	Pemberian makanan tambahan pada LKSA			
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
4	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
	Total Bantuan Sosial			
	Total I + II + III			

**diisi sesuai dengan sub kegiatan yang ada di masing-masing SKPD*

Blitar, 31 Desember 2024
Kepala SKPD ... Kabupaten
Blitar

(NAMA LENGKAP)
NIP. ...

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 dibuat sebagai salah satu bentuk Pertanggungjawaban keuangan atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Selain itu, sebagai wujud nyata dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah sebagai sebuah entitas akuntansi/pelaporan.

Blitar, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS KOMINFOTIKSAN

HERMAN WIDODO, SH.

Pembina Utama Muda
NIP.19650916 199112 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Pemeriksaan Kas dilampiri Fotocopy Rekening Koran per 31 Desember 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan beserta Lampirannya
3. Daftar Inventarisasi Piutang Daerah per 31 Desember 2024
4. Daftar Inventarisasi Aset Perolehan per 31 Desember 2024 dilampiri KIB Perolehan tahun 2024 dari Simda BMD (Laporan Penatausahaan-KIB/KIR-Laporan KIB A/B/C/D-Pilih 2024)
5. Daftar Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024
6. Daftar Utang Beban yang Belum Dibayar s.d 31 Desember 2024
7. Daftar Beban Sewa Dibayar Dimuka s.d 31 Desember 2024
8. Daftar Pendapatan Diterima Dimuka s.d 31 Desember 2024
9. Daftar Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga per 31 Desember 2024
10. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan s.d 31 Desember 2024
11. Daftar Hibah Barang (Aset) dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/Organisasi s.d 31 Desember 2024 □ di luar Penanganan Covid-19
12. Daftar Hibah Barang (Persediaan) dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/Organisasi s.d 31 Desember 2024 □ di luar Penanganan Covid-19
13. Rincian Barang ke Neraca dan Rekapitulasi Barang ke Neraca dari Simda BMD (Laporan-Akuntansi-Rincian Barang ke Neraca)
14. Rekap Perhitungan Penyusutan per 31 Desember 2023 (dari Bidang Aset)
15. Berita Acara Rekonsiliasi LRA Semester II TA 2024 (antara PPK dengan Bidang Akuntansi)
16. Berita Acara Rekonsiliasi BMD Semester II TA 2024 (antara PPK dengan Bidang Akuntansi)